

## ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK DIREKTUR UTAMA TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF DI INDONESIA

Robi Asroni, Etna Nur Afri Yuyetta<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This research was aimed to analyze the effect of corporate governance, executive compensation, and CEO characteristics on the level of tax aggressiveness. Tax aggressiveness measured by the effective tax rate (ETR). Corporate governance proxied by the amount of the board of directors and the percentage of independent commissioners. CEO characteristics are proxied by the age and tenure of CEO. Firm size, firm performance, and capital intensity are used as control variables. The population of this research was all financial sectors firm listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2016. The sample was selected using a purposive sampling method and obtained 191 companies. This research uses quantitative methods using multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the amount of board directors and the percentage of independent commissioners have a significant positive effect on tax aggressiveness. The executive compensation and the CEO age have a negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, the term of CEO tenure has a positive but not significant effect on tax aggressiveness.*

*Keywords: Tax aggressiveness, corporate governance, board of directors, independent board of commissioners, executive compensation, CEO age, CEO tenure.*

### PENDAHULUAN

Tindakan pajak agresif atau juga dikenal dengan istilah agresivitas pajak didefinisikan oleh Frank *et al.*, (2009) sebagai suatu strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik yang termasuk atau tidak termasuk pengelakan pajak. Terdapat dua bentuk pengelakan pajak dari sisi legalitasnya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum (*lawful*) sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang melanggar hukum (*unlawful*). Adapun dari sisi etis kedua praktik tersebut bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang-undang perpajakan.

Adanya selisih pajak (*tax gap*) pada capaian realisasi penerimaan pajak menjadi indikasi bahwa wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak. Sejalan dengan itu, banyak pihak yang memanfaatkan celah atau kelemahan pada peraturan perpajakan yang ada sehingga menjadikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang legal tapi dapat merugikan negara. Menurut PSAK 46 tentang pajak penghasilan, laba perusahaan digolongkan menjadi dua yaitu laba akuntansi menurut laporan keuangan dan laba fiskal menurut peraturan perpajakan. Perbedaan prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan merupakan celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, tidak spesifiknya peraturan ataupun inkonsistensi pelaksanaan peraturan juga berpotensi menciptakan *grey area* di bidang perpajakan, yang kemudian menimbulkan perbedaan penilaian terhadap suatu transaksi atau kejadian antara wajib pajak dengan petugas pajak. Secara umum, pengelakan pajak yang terjadi tidak hanya disebabkan karena masalah peraturan yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, tetapi juga bisa disebabkan karena faktor kesengajaan dengan melanggar peraturan perpajakan atau biasa disebut

---

<sup>1</sup> Corresponding author

sebagai penggelapan pajak. Pada praktiknya, penggelapan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan merekayasa biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan sebagai pengurang pendapatan ataupun dengan menyembunyikan sebagian pendapatan yang seharusnya dilaporkan dalam SPT.

Disamping dapat meminimalkan beban pajak perusahaan, tindakan agresivitas pajak juga berisiko terhadap hancurnya reputasi perusahaan, sanksi administrasi dan sanksi denda dari fiskus bilamana hasil audit ditemukan bukti kecurangan. Kecurangan yang terjadi cenderung disebabkan karena adanya permasalahan agensi antara pemegang saham dengan manajer. Pemegang saham menginginkan agresivitas pajak pada ukuran yang tepat dan jangka panjang, sedangkan manajer sebagai pihak yang diberikan wewenang berupaya melakukan *rent extraction* untuk kepentingan pribadi dan jangka pendek yang berpotensi buruk bagi kelangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, peran tata kelola perusahaan yang sehat diperlukan untuk meminimalisir tindakan oportunistis manajer dalam melakukan agresivitas pajak.

Hubungan antara tata kelola perusahaan, kompensasi direktur utama dan agresivitas pajak telah diteliti sebelumnya oleh Halioui *et al.*, (2016) di Amerika dengan menggunakan sampel perusahaan yang tercatat di bursa NASDAQ 100. Sedangkan untuk di Indonesia, penelitian terkait agresivitas pajak belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia terkait agresivitas pajak telah dilakukan oleh Sari (2017) yang mengaitkannya dengan *corporate social responsibility*, kepemilikan mayoritas, dan *corporate governance*. Belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan, kompensasi dan karakteristik direktur utama terhadap tindakan pajak agresif, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengembangkan penelitian sebelumnya. Selain itu, model penelitian juga penulis sesuaikan dengan sistem dewan yang diterapkan di Indonesia dimana struktur dewan perusahaan yang digunakan adalah sistem *two-tier*.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Praktik tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya teori agensi (*agency theory*). Teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Berdasarkan teori agensi, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan tindakan pajak agresif pada ukuran yang tepat dan jangka panjang. Disisi lain, manajer sebagai pihak yang diberikan wewenang berupaya melakukan *rent extraction* untuk kepentingan pribadi dan jangka pendek sehingga kepentingan pemegang saham dirugikan. Adanya benturan kepentingan tersebut kemudian menimbulkan masalah keagenan. Oleh karena itu, peran tata kelola perusahaan yang sehat diperlukan untuk meminimalisir tindakan oportunistis manajer sehubungan dengan agresivitas pajak.

### **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Desai dan Dharmapala (2006) dalam Halioui (2016) mengatakan bahwa agresivitas pajak umumnya dihubungkan dengan *rent diversion* sehingga logis jika mengasumsikan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Minnick dan Noga (2010) dalam Halioui (2016) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Atau dengan kata lain, semakin kecil ukuran dewan direksi maka semakin tinggi agresivitas pajak dan semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin rendah agresivitas pajak.

Proksi lain dalam penelitian ini yaitu persentase dewan komisaris independen. Menurut Zhou (2011) perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang besar dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak, sebab komisaris independen yang ditunjuk pemegang saham akan melindungi kepentingan mereka dari perilaku oportunistis manajer. Menurut Armstrong *et al.*, (2015) persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dibagi menjadi dua sub-hipotesis yaitu:

H1a : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

H1b : Persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak**

Peningkatan kompensasi eksekutif berpotensi mengurangi konflik agensi yang seringkali terjadi dalam internal perusahaan. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) peningkatan kompensasi eksekutif cenderung mengurangi tingkat agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena kompensasi dapat menyalurkan kepentingan prinsipal dan agen sehingga mencegah perilaku oportunistik eksekutif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Karakteristik Direktur Utama terhadap Agresivitas Pajak**

Pada penelitian ini, karakteristik direktur utama diprosisikan melalui usia dan masa jabatan direktur utama. Hambrick dan Mason (1984) menemukan bahwa eksekutif dengan usia yang lebih tua cenderung menghindari risiko. Mereka beranggapan keamanan karir dan finansial adalah hal yang penting. Minnick dan Noga (2010) dalam Halioui (2016) menemukan hubungan negatif antara usia eksekutif dan agresivitas pajak, dimana dua variabel tersebut diuji menggunakan cash ETR. Secara psikologis, faktor usia dapat berpengaruh terhadap kematangan moral dan etika seseorang. Menurut Peterson *et al.*, (2001); Sundaram dan Yermack (2007), individu akan bersikap konservatif dan etis seiring bertambahnya usia. Moralitas eksekutif yang tinggi diharapkan mampu menurunkan perilaku tidak etis sehubungan dengan agresivitas pajak.

Proksi lain yaitu masa jabatan direktur utama. Menurut Lanis dan Richardson (2011) dalam Halioui (2016) masa jabatan eksekutif menentukan kemampuan mereka untuk memengaruhi komposisi dan peran pengawasan dewan komisaris. Secara umum, eksekutif dengan masa jabatan yang lebih lama memiliki banyak pengalaman dalam mengelola prosedur pajak termasuk dalam penerapan strategi agresivitas pajak. Oleh sebab itu, masa jabatan eksekutif diprediksi mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dibagi menjadi dua sub-hipotesis yaitu :

H3a : Usia direktur utama berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

H3b : Masa Jabatan direktur utama berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dengan membandingkan total beban pajak penghasilan terhadap penghasilan akuntansi sebelum pajak (Chen *et al.*, 2010). Adapun total beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan direksi, persentase dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, usia direktur utama, dan masa jabatan direktur utama. Variabel ukuran dewan direksi disimbolkan dengan DIREKSI diukur dengan menghitung jumlah total anggota dewan direksi suatu perusahaan pada saat perusahaan dijadikan sampel penelitian. Variabel persentase dewan komisaris independen disimbolkan dengan PDKI diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen suatu perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan dikalikan 100%. Variabel usia direktur utama disimbolkan dengan AGE diukur berdasarkan usia direktur utama ketika menjabat di suatu perusahaan pada saat perusahaan dijadikan sampel penelitian. Variabel masa jabatan direktur utama disimbolkan dengan TENURE diukur berdasarkan lama masa pengabdian direktur utama di suatu perusahaan pada saat perusahaan dijadikan sampel penelitian. Variabel kompensasi eksekutif disimbolkan dengan LnEXCOM diukur dengan menjumlahkan kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan direktur utama selama satu tahun kemudian dikonversi ke dalam bentuk logaritma natural. Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan intensitas modal. Variabel ukuran perusahaan disimbolkan dengan LnSIZE diukur dengan mengonversi total aset perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Variabel kinerja perusahaan disimbolkan dengan ROA diukur dengan membandingkan total laba bersih terhadap total asset. ROA merupakan salah satu indikator keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas total aktiva yang dimiliki perusahaan (Fakhrudin, 2008). Variabel intensitas modal (*capital intensity*) disimbolkan dengan CAPINT diukur dengan membandingkan *net property, plant, and equipment* terhadap total asset.

## Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2016. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan keuangan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) selama tahun 2014-2016;
2. Perusahaan yang mempunyai laba positif selama tahun penelitian. Kriteria ini digunakan karena jika perusahaan pada kondisi rugi maka nilai ETR menjadi negatif sehingga mempersulit perhitungan;
3. Perusahaan dengan rentang nilai ETR antara 0-1 dapat memudahkan perhitungan. Semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan cenderung agresif terhadap pajak;
4. Perusahaan yang mengungkapkan besaran kompensasi eksekutif, karakteristik dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen;
5. Perusahaan tersebut memiliki periode akuntansi yang berakhir 31 Desember.

## Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$TAG = \alpha_0 + \beta_1 DIREKSI_{it} + \beta_2 PDKI_{it} + \beta_3 LnEXCOM_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 TENURE_{it} + \beta_6 LnSIZE_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 CAPINT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TAG	= Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan proksi <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)
DIREKSI <sub>it</sub>	= Jumlah total anggota dewan direksi
PDKI <sub>it</sub>	= Persentase komisaris independen, perbandingan jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris dikali 100%
LnEXCOM	= Logaritma natural dari total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan direktur utama
AGE <sub>it</sub>	= Usia Direktur Utama
TENURE <sub>it</sub>	= Masa Jabatan Direktur utama
LnSIZE	= Ukuran perusahaan, mengonversi total asset ke dalam bentuk logaritma natural
ROA <sub>it</sub>	= <i>Return on Assets</i> , perbandingan laba bersih terhadap total asset
CAPINT <sub>it</sub>	= <i>Capital intensity</i> , rasio <i>net property, plant, and equipment</i> terhadap total asset
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$ - $\beta_8$	= Koefisien regresi
$\varepsilon_{it}$	= Kesalahan regresi
it	= Perusahaan <i>i</i> pada tahun <i>t</i>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel dan Variabel

Selama periode 2014-2016 terdapat 243 perusahaan keuangan. Sebanyak 24 perusahaan dikeluarkan dari sampel penelitian karena perusahaan tersebut tidak menyediakan data laporan tahunan yang memuat besaran kompensasi eksekutif, karakteristik dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen secara lengkap. Adapun 20 perusahaan lainnya juga dikeluarkan dari sampel penelitian karena perusahaan tersebut pada kondisi rugi selama tahun penelitian, sehingga diperoleh total sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 199 sampel. Dari 199 sampel tersebut kemudian diolah untuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Setelah dilakukan pengujian ditemukan 8 perusahaan yang memiliki data outlier, sehingga diperoleh total sampel akhir sebanyak 191.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, untuk variabel independen, DIREKSI memiliki nilai rata-rata sebesar 5,27 dan deviasi standar 2,56. Deviasi standar lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel DIREKSI memiliki varian sebaran data yang sempit. Nilai minimum dan maksimum variabel DIREKSI masing-masing 2 dan 12, sehingga nilai range yang diperoleh sebesar 10. Nilai range yang tinggi menyebabkan tingkat keragaman data semakin tinggi, sehingga data bersifat heterogen. Variabel PDKI memiliki nilai rata-rata sebesar 0,513109

dan deviasi standarnya 0,1282128. Deviasi standar lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel PDKI memiliki varian sebaran data yang sempit. Nilai minimum dan maksimum variabel PDKI masing-masing 0,33 dan 1, sehingga nilai range yang diperoleh sebesar 67%. Nilai range yang tinggi menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang beragam. Variabel AGE memiliki nilai rata-rata 55,01 dan deviasi standarnya 6,56305. Deviasi standar lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel AGE memiliki varian sebaran data yang sempit. Nilai AGE terendah yaitu 29 yang merupakan nilai dari PT Arthavest Tbk pada tahun 2016. Nilai AGE tertinggi yaitu sebesar 70 yang merupakan nilai dari PT Buana Finance Tbk pada tahun 2015 sehingga nilai range yang diperoleh sebesar 41. Nilai range yang tinggi menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang beragam. Variabel TENURE memiliki nilai rata-rata sebesar 5,72 dan deviasi standar sebesar 5,93594. Deviasi standar lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel TENURE memiliki varian sebaran data yang luas. Nilai minimum dan maksimum variabel TENURE masing-masing sebesar 1 dan 30, sehingga nilai range yang diperoleh sebesar 29. Nilai range yang tinggi menyebabkan tingkat keragaman data semakin tinggi, sehingga data bersifat heterogen. Variabel LnEXCOM memiliki nilai rata-rata sebesar 23,16 dan deviasi standar sebesar 1,60268. Deviasi standar lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel LnEXCOM memiliki varian sebaran data yang sempit. Nilai LnEXCOM terendah dimiliki oleh PT Majapahit Inti Corpora Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 140.446.150, sedangkan nilai LnEXCOM tertinggi dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 326.628.000.000 sehingga diperoleh nilai range sebesar Rp 326.487.553.850. Nilai range yang tinggi menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang beragam.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DIREKSI	191	2	12	5,27	2,56
PDKI	191	,3333	1	,513109	,1282128
AGE	191	29	70	55,01	6,56305
TENURE	191	1	30	5,72	5,93594
LnEXCOM	191	18,76	26,51	23,16	1,60268
LnSIZE	191	24,71	34,58	29,68	2,28395
ROA	191	,00029	,16404	,0283690	,0280961
CAPINT	191	,00025	,8347	,0413482	,1034499
Valid N (listwise)	191				

Sumber : data sekunder 2018, diolah

Keterangan :

- DIREKSI : Ukuran Dewan Direksi
- PDKI : Persentase Dewan Komisaris Independen
- AGE : Usia Direktur Utama
- TENURE : Masa Jabatan Direktur Utama
- LnEXCOM : Total Kompensasi Eksekutif
- LnSIZE : Ukuran Perusahaan
- ROA : Kinerja Perusahaan
- CAPINT : *Property, Plant, and Equipment*

Sedangkan untuk variabel kontrol, LnSIZE memiliki nilai rata-rata sebesar 29,68 dan deviasi standarnya 2,28395. Deviasi standar lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel LnSIZE memiliki varian sebaran data yang sempit. Nilai LnSIZE terendah yaitu sebesar Rp 53.797.186.441 yang merupakan nilai dari PT Yulie Sekurindo Tbk pada tahun 2015. Nilai LnSIZE tertinggi yaitu sebesar Rp 1.038.706.009.000.000 yang merupakan nilai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2016. Dengan demikian, diperoleh nilai *range*

sebesar Rp 1.038.652.211.813.560. Nilai *range* yang tinggi menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang beragam. Variabel ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0283690 dan deviasi standarnya 0,0280961. Deviasi standar lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki varian sebaran data yang sempit. Nilai minimum dan maksimum variabel ROA masing-masing sebesar 0,00029 dan 0,16404, sehingga nilai *range* yang diperoleh sebesar 0,16375 atau 16,375%. Nilai *range* yang tinggi menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang beragam. Variabel CAPINT memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0413482 dan deviasi standarnya 0,1034499. Deviasi standar lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variabel CAPINT memiliki varian sebaran data yang luas. Nilai minimum dan maksimum variabel CAPINT yaitu 0,00025 dan 0,8347, sehingga nilai *range* yang diperoleh sebesar 0,83445 atau 83,445%. Nilai *range* yang tinggi menyebabkan tingkat keragaman data semakin tinggi, sehingga data bersifat heterogen.

**Uji Model**

Uji model dalam penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi dan uji pengaruh simultan (Uji F). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai seberapa jauh model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik F menggambarkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil uji adjusted  $R^2$  diperoleh nilai sebesar 51,5%. Hal ini berarti besarnya kemampuan variabel independen seperti jumlah direktur (DIREKSI), persentase dewan komisaris independen (PDKI), usia direktur utama (AGE), masa jabatan direktur utama (TENURE), ukuran perusahaan (LnSIZE), kompensasi eksekutif (LnEXCOM), kinerja perusahaan (ROA), dan *capital intensity* (CAPINT) dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu ETR (proksi dari agresivitas pajak) adalah sebesar 51,5%, sedangkan 48,5% dijelaskan oleh faktor di luar variabel independen.

Adapun untuk hasil uji statistik F, nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,01 pada tingkat signifikansi 1%, sehingga memberi gambaran bahwa model regresi bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen atas variabel dependen.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu yaitu ukuran dewan direksi, persentase dewan komisaris, usia direktur utama, masa jabatan direktur utama, kompensasi eksekutif, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan intensitas modal mempengaruhi variabel dependen berupa agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR. Adapun hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2**  
**Uji Statistik t (Uji signifikansi Individual )**

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std.Error	Beta			
(Constant)	-,516	,141	-,262		-3,655	,000
DIREKSI	-,010	,004	-,114		-2,429	,016
PDKI	-,086	,041	,232		-2,082	,039
AGE	,003	,001	-,007		4,208	,000
TENURE	,000	,001	,493		-,120	,905
LnEXCOM	,030	,007	-,004		4,309	,000
LnSIZE	,000	,005	-,650		-,034	,973
ROA	-2,235	,208	,305		-10,753	,000
CAPINT	,285	,051			5,602	,000

Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah tahun 2018.

Keterangan :

DIREKSI : Ukuran Dewan Direksi

PDKI	: Persentase Dewan Komisaris Independen
AGE	: Usia Direktur Utama
TENURE	: Masa Jabatan Direktur Utama
LnEXCOM	: Total Kompensasi Eksekutif
LnSIZE	: Ukuran Perusahaan
ROA	: Kinerja Perusahaan
CAPINT	: <i>Property, Plant, and Equipment</i>

Variabel ukuran dewan direksi (DIREKSI) berdasarkan hasil uji pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai koefisien beta  $-2,429$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,016$  lebih rendah dari  $0,05$  pada tingkat signifikansi  $5\%$  sehingga dapat dikatakan jika ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Semakin besar ukuran dewan direksi akan membuat nilai ETR semakin kecil. Semakin kecil nilai ETR (mendekati  $0$ ) merefleksikan bahwa perusahaan semakin gencar melakukan tindakan agresivitas pajak. Atau dengan kata lain, semakin besar ukuran dewan direksi akan membuat tingkat agresivitas pajak juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis (H1a) yang menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Hasil studi penulis tidak sejalan dengan landasan teori yang diambil dari teori agensi. Keadaan ini disebabkan oleh hasil temuan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Landasan teori yang menjelaskan adanya beda kepentingan antara agen dan prinsipal, dimana agen diidentikkan mempunyai sifat oportunistik dalam menjalankan agresivitas pajak tidak terbukti. Hasil penelitian ini cenderung menunjukkan agen dan prinsipal telah memiliki kepentingan yang sama untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Variabel persentase dewan komisaris independen (PDKI) berdasarkan hasil tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil yang menunjukkan nilai koefisien beta  $-2,082$  dan nilai signifikansi sebesar sebesar  $0,039$  lebih rendah dari  $0,05$  pada tingkat signifikansi  $5\%$  sehingga dapat dikatakan jika variabel persentase dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Semakin besar persentase dewan komisaris independen akan membuat nilai ETR semakin kecil. Semakin kecil nilai ETR (mendekati  $0$ ) menunjukkan jika perusahaan semakin gencar melakukan tindakan agresivitas pajak. Atau dengan kata lain, semakin besar persentase komisaris independen akan membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis (H1b) yang menyatakan persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Hasil studi ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Armstrong et al., (2015) bahwa semakin banyak persentase komisaris independen berpengaruh negatif atas agresivitas pajak. Keadaan ini disebabkan oleh hasil temuan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Itu artinya, semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pula tekanan yang diberikan kepada manajer untuk melakukan agresivitas pajak demi kepentingan pemegang saham.

Variabel kompensasi eksekutif (LnEXCOM) berdasarkan hasil tersebut berpengaruh positif signifikan atas ETR. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil yang menunjukkan nilai koefisien beta  $4,309$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000$  lebih rendah dari  $0,01$  pada tingkat signifikansi  $1\%$ , sehingga dapat dikatakan jika variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Semakin besar kompensasi eksekutif akan membuat nilai ETR semakin besar. Semakin besar nilai ETR (menjauhi  $0$ ) mengartikan bahwa tingkat agresivitas pajak yang semakin rendah. Atau dengan kata lain, Semakin besar kompensasi eksekutif akan membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin rendah. Oleh karena itu, hipotesis (H2) yang menyatakan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif atas agresivitas pajak diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang optimal kepada eksekutif merupakan cara terbaik yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer melalui tindakan penghindaran pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006), mereka beranggapan bahwa kompensasi optimal yang diberikan kepada direktur eksekutif mampu menurunkan biaya agensi yang dibayarkan oleh perusahaan dengan adanya hubungan antara pembayaran dan kinerja, sehingga agen bertindak searah dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini membuktikan bahwa teori agensi yang menjelaskan

permasalahan agensi yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terbukti.

Variabel usia direktur utama (AGE) berdasarkan hasil uji tersebut berpengaruh positif signifikan atas ETR. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien beta 4,208 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,01 pada tingkat signifikansi 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel usia direktur utama memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Semakin bertambah usia direktur utama akan membuat nilai ETR semakin besar. Nilai ETR yang besar (menjauhi 0) mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang semakin rendah. Atau dengan kata lain, semakin bertambah usia direktur utama akan membuat tingkat agresivitas pajak semakin rendah. Oleh karena itu, hipotesis (H3a) yang menyatakan usia direktur utama berpengaruh negatif atas agresivitas pajak diterima. Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hambrick dan Mason (1984). Mereka mendapati jika usia direktur utama berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Keamanan karir dan finansial merupakan alasan utama. Oleh sebab itu, eksekutif dengan usia yang lebih tua cenderung menghindari risiko.

Variabel masa jabatan direktur utama (TENURE) berdasarkan hasil tersebut berpengaruh negatif tidak signifikan atas ETR. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien beta -0,120 dan nilai signifikansi sebesar 0,905 lebih besar dari 0,1 pada tingkat signifikansi 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel masa jabatan direktur utama tidak memiliki pengaruh signifikan atas ETR. Oleh sebab itu, hipotesis (H3b) yang menyatakan masa jabatan direktur utama berpengaruh positif atas agresivitas pajak ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) bahwa masa jabatan eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Mereka beranggapan bahwa eksekutif dengan masa jabatan yang lebih lama memiliki banyak pengalaman dalam mengelola prosedur pajak termasuk dalam strategi penerapan pajak agresif. Dengan demikian, hasil studi ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi masa jabatan direktur utama tidak menjadikan ia memiliki keberanian besar untuk membuat kebijakan penghindaran pajak.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari ukuran dewan direksi, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, usia direktur utama, dan masa jabatan direktur utama terhadap tindakan pajak agresif di Indonesia. Studi ini menggunakan sampel sebanyak 191 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif atas agresivitas pajak. Hal ini mengartikan, semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif dan semakin kecil ukuran dewan direksi maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini cenderung menunjukkan agen dan prinsipal telah memiliki kepentingan yang sama untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Persentase dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan atas agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase komisaris independen maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif, dan semakin kecil persentase komisaris independen maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi eksekutif maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif dan semakin kecil kompensasi eksekutif maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006), mereka beranggapan bahwa kompensasi optimal yang diberikan kepada direktur eksekutif mampu menurunkan biaya agensi yang dibayarkan oleh perusahaan dengan adanya hubungan antara pembayaran dan kinerja, sehingga agen bertindak searah dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini membuktikan bahwa teori agensi yang menjelaskan permasalahan agensi yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terbukti.

Usia direktur utama berpengaruh negatif signifikan atas agresivitas pajak. Hal ini mengartikan semakin tua usia direktur utama maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif dan semakin muda usia direktur utama maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Keamanan karir dan finansial merupakan alasan utama. Oleh sebab itu, eksekutif dengan usia yang lebih tua cenderung menghindari risiko, dan sebaliknya eksekutif dengan usia muda cenderung menyukai tantangan dan risiko.

Masa jabatan direktur utama mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengilustrasikan bahwa semakin tinggi masa jabatan seorang eksekutif tidak menjadikan eksekutif tersebut memiliki keberanian yang besar untuk membuat kebijakan penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya. Makin rendah masa jabatan direktur utama tidak menjadikan eksekutif tersebut memiliki keberanian yang besar untuk membuat kebijakan penghindaran pajak. Keadaan ini berbanding terbalik dengan teori yang sudah dijelaskan bahwa direktur dengan masa jabatan yang tinggi cenderung lebih berpengalaman dalam hal prosedur pajak perusahaan dan memiliki keberanian untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan jasa sektor keuangan yang ada di Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi seluruh sektor yang memiliki karakteristik berbeda. *Kedua*, penelitian menggunakan GAAP ETR sebagai satu-satunya proksi agresivitas pajak dimana GAAP ETR memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan dalam pengukurannya.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian-penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian lebih mampu untuk menggambarkan keadaan agresivitas pajak di Indonesia. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan proksi selain ETR untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Proksi *Book Tax Differences* (BTD), *Cash ETR*, *Current ETR* dan *Discretionary Permanent BTDs* (DTAX) dapat dijadikan sebagai proksi alternatif. Pada penelitian selanjutnya perlu dicari karakteristik eksekutif yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan lebih baik, mengingat pada penelitian ini hanya sebagian karakteristik eksekutif yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karakteristik eksekutif seperti gender eksekutif dan kebangsaan eksekutif dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

## REFERENSI

- Armstrong, C.S., Blouin, J.L. Jagolinzer, A.D., Larcker, D.F. 2015. "Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance". *Journal of Accounting and Economics*, 60 (1) : 1-17.
- Chen, Shuping, Xia Cheng, Qiang Cheng, & Terry Shevlin. 2010. "Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-Family Firms?". *Journal of Financial Economics*, 91 (1): 41-61.
- Desai, M and Dharmapala, D. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives", *Journal of Financial Economics*, 79 (1) : 145-179.
- Fakhrudin, Hendy M. 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Frank, M.M., Luann, L. J., and Rego, S.O., 2009. 'Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting'. *The Accounting Review*, Vol. 84 No.2, pp. 467-496.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halioui, Khamoussi., Souhir Neifar and Fouad Ben Abdelaziz. 2016. "Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100". *Review of Accounting and Finance*, 15 (4) : 445-462.



- Hambrick, D.C. dan Mason, P.A. 1984. "Upper Echelons: The Organizations As A Reflection of Its Top Managers". *Academy of Management Review*, Vol. 9 No. 2, pp. 193-206.
- Lanis, R., and Richardson, G. 2011a. "The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness". *Journal of Accounting and Public Policy*, 30 (1) : 50-70.
- Lanis, R., and Richardson, G. 2011b. "The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness". *Journal of Accounting and Public Policy*, 31 (1) : 86-108.
- Peterson, D., A. Rhoads, and B. C. Vaught. 2001. "Ethical beliefs of business professionals: A study of gender, age and external factors". *Journal of Business Ethics*, 31 (3): 225–233.
- Sundaram, R. K., and D. Yermack. 2007. "Pay me later: Inside debt and its role in managerial compensation". *The Journal of Finance*, 62 (4): 1551–1587.
- Xynas, L. (2011). "Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance". *Revenue Law Journal* Vol.20 Issue.1
- Zhou, Y. 2011. "Ownership Structure, Board Characteristics, And Tax Aggressiveness". Hong Kong: University of Hong Kong.